

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, SISTEM PENGENDALIAN INTERN, AKUNTABILITAS PUBLIK DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Nur Cholis, Fadli

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu

Abstract

This research is a quantitative research that aims to see whether there is influence of information technology utilization, internal control system of government and public accountability to performance of government institution. This study uses the Organization of Regional Devices (OPD) Bengkulu City as a sample of research.

The sample selection in this research is done by using purposive sampling method. Hypothesis testing in this study used Multiple Linear Regression Analysis with the help of SPSS program.

The result of the test is 1) there is significant influence of the utilization of information technology to the performance of government institution, 2) there is significant influence of internal control system of government performance of government institution, 3) there is significant influence of public accountability to performance of government institution.

Keywords: Utilization of Information Technology, Government Internal Control System, Public Accountability and Government Institution Performance

1. Pendahuluan

Perangkat Daerah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah. Berdasarkan Permendagri No 18 tahun 2016 tentang perangkat Daerah yang tertera pada pasal 5 menerangkan bahwa perangkat daerah Kabupaten/Kota meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan dan kecamatan.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah maka penyerahan pelimpahan dan penugasan urusan pemerintah kepada daerah secara nyata dan bertanggungjawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil termasuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanannya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih efisien, efektif dan bertanggungjawab yang diperbaharui dengan UU No 32 tahun 2004. Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah agar senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya, dengan berupaya

memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintahan tersebut.

Tugas utama pemerintah sebagai organisasi sektor publik adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat merupakan sebuah konsep yang sangat multikompleks. Kesejahteraan masyarakat tidak hanya berupa kesejahteraan fisik yang bersifat material saja, namun termasuk kesejahteraan nonfisik yang bersifat immaterial (Mahmudi, 2005:8). Tekanan terhadap organisasi sektor publik, khususnya organisasi pemerintah baik pusat dan daerah serta perusahaan milik pemerintah, dan organisasi sektor publik lainnya untuk memperbaiki kinerjanya mendorong dibangunnya sistem manajemen organisasi sektor publik yang berbasis kinerja (*performance-based management*) (Mahmudi, 2005:1).

Kemampuan sistem pengukuran kinerja untuk meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih sering dipertanyakan, baik diluar negeri maupun di Indonesia. Hal ini akibat dari banyaknya penelitian yang menunjukkan bahwa adanya masalah dalam implementasi sistem pengukuran kinerja ini. Laporan kinerja instansi pemerintah disusun sebagai wujud pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja untuk memberikan gambaran perkembangan capaian kinerja dan diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat pendorong dan pendukung terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. Dalam penelitian Harimurti (2004) menunjukkan bahwa indikator *outcome* sebelum spesifik dan tidak jelas sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan interpretasi. Disamping itu, selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari satuan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sulit untuk dilakukan secara objektif.

Kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif suatu kebijakan operasional yang diambil (Nasir dan Oktari, 2013). Menurut Bastian (2001:329) kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja instansi pemerintah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Di mana dalam penelitian Nasir dan Oktari (2013) menyebutkan bahwa perkembangan teknologi informasi direspon oleh organisasi dengan mendesain sistem informasi berbasis teknologi komputer atau website. Sistem informasi yang didukung TI dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi jika didesain menjadi sistem informasi yang efektif. Kinerja organisasi sangat dipengaruhi oleh penguasaan teknologi informasi dari karyawan suatu organisasi. Dengan aplikasi teknologi maka organisasi akan mengalami perubahan sistem manajemen, dari sistem tradisional ke sistem manajemen kontemporer.

Faktor kedua yang berpengaruh terhadap kinerja adalah pengendalian intern. Dalam PP No. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, *reviu*, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dari fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Faktor ketiga yang juga mempengaruhi kinerja adalah akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi dan hak untuk didengar partisipasinya (Irfan, 2016).

Dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Bengkulu tahun 2016 disebutkan bahwa secara umum pencapaian sasaran dan pelaksanaan program/kegiatan tahun 2016 telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan jika dilihat dari sisi realisasi, baik secara fisik maupun keuangan secara umum dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2016 kinerja instansi kota Bengkulu sudah mengalami peningkatan. Tetapi di sisi lain masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan, yakni terkait dengan konsistensi perencanaan dan implementasi program, sinergitas antara program yang satu dengan lainnya serta keterbatasan anggaran dalam menunjang program pembangunan. Disamping itu permasalahan lainnya yaitu masih kurangnya pemahaman aparatur mengenai SAKIP, kurang dipahaminya tugas pokok dan fungsi OPD oleh aparatur, kurang tertibnya unit kerja dalam melengkapi dan menyusun dokumen-dokumen kinerja (LKjIP, 2016). Dengan adanya laporan kinerja ini, Pemerintah Kota Bengkulu telah mencoba mempertanggungjawabkan segala upaya yang telah dilaksanakan dalam mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Bengkulu yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Nasir dan Oktari (2013) yang mencoba kembali menguji penelitian tersebut yang menggunakan dua variabel yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern tetapi pada penelitian ini adanya penambahan satu variabel independen yaitu, akuntabilitas publik. Selain penambahan satu variabel independen responden dan tempat penelitian yang berbeda. Dari hasil penelitian Nasir dan Oktari (2013) ada kemungkinan pengaruh ini juga terjadi dalam pengukuran kinerja Kota Bengkulu. Kota Bengkulu dipilih sebagai objek penelitian dikarenakan masih terbatasnya penelitian dibidang pemerintahan khususnya di Kota Bengkulu, oleh karena itu penelitian ini menguji pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern pemerintah dan akuntabilitas publik terhadap kinerja instansi pemerintah di Kota Bengkulu.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kinerja Instansi Pemerintah

Teknologi informasi merupakan teknologi yang mempunyai kemampuan untuk menangkap (capture), menyimpan (store), mengolah (process), mengambil kembali (retrieve) dan menyebarkan (transmit) informasi dan sebagai sarana dalam meningkatkan kinerja baik pemerintahan maupun perusahaan yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi tersebut (Wansyah dan Bakar, 2012).

Penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Manfaat yang dapat dirasakan antara lain yaitu pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum, pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh dan pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien (Syaiyfullah, 2013).

Chintya (2015), menyatakan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja instansi Pemerintah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rahadi (2007) menyatakan bahwa informasi teknologi sangat berperan dalam peningkatan pelayanan di sektor publik.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H1: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah.

2.2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kinerja Instansi Pemerintah

Dalam PP No. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arah pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi serta sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi suatu instansi pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian intern terdiri atas review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan.

Nasir dan Oktari (2013) menyatakan bahwa pengendalian intern memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja instansi Pemerintah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Chintya (2015) yang menyatakan bahwa pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kinerja instansi Pemerintah.

Berdasarkan uraian hasil penelitian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H2: Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah

2.3. Akuntabilitas Publik dan Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002).

Nagawa (2012) Tujuan dari akuntabilitas adalah Untuk menjelaskan bagaimanakah pertanggungjawaban hendak dilaksanakan, metode apa yang dipakai untuk melaksanakan tugas, bagaimana realitas pelaksanaannya dan apa dampaknya. Dengan adanya akuntabilitas yang baik maka telah menggambarkan pelaksanaan misi organisasi dan sasaran tujuan telah tercapai.

Deki (2013) menyatakan bahwa akuntabilitas publik memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi publik pada SKPD kota padang. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Arifin (2014) juga menyebutkan bahwa akuntabilitas publik memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi publik.

Berdasarkan uraian hasil penelitian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H3: Akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah.

2. Metode Penelitian

3.1. Populasi dan Sampel

Sugiyono (2010) menyatakan bahwa populasi adalah generalisasi yang terdiri atas, objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh instansi pemerintah Kota Bengkulu sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah institusi/lembaga yang meliputi Sekretariat, inspektorat, dinas, badan, dan kecamatan pada Pemerintah Kota Bengkulu yang terdiri dari 38 OPD. Responden masing-masing diambil satu dari setiap OPD. Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas instansi terkait.

3.2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja instansi pemerintah pada organisasi perangkat daerah (OPD). Kinerja OPD yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkat pencapaian dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert dengan 5 poin, poin yang di maksud dalam penelitian ini yaitu penelitian terhadap responden diberi skor 1-5. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja instansi pemerintah dalam penelitian ini yaitu: input(masukan), output (keluaran), outcome(hasil), benefit(manfaat), dan impact (dampak).

Variabel Independen penelitian ini terdiri dari pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern pemerintah, dan Akuntabilitas Publik.

- a. Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya pengolahan data, informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik serta pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses dengan mudah. Pemanfaatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh instansi pemerintah pada OPD kota Bengkulu. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert dengan 5 point. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Pemanfaatan komputer dan pemanfaatan jaringan internet.
- b. Penerapan sistem pengendalian internal pemerintah yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu merupakan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi pemerintah Kota Bengkulu untuk mencapai tujuan dan sarannya. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert dengan 5 point. Indikator yang digunakan mengukur pengendalian intern pemerintah dalam penelitian ini yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.
- c. Akuntabilitas publik dalam penelitian ini maksudnya adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah pada OPD kota Bengkulu untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran terhadap publik yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert dengan 5 point. Indikator yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas publik diadopsi dari Arifin (2014) yaitu: pertanggungjawaban dan

pelaksanaan.

3.2 Metode Analisis

Analisis data digunakan untuk menggambarkan keadaan lapangan secara deskriptif dengan menginterpretasikan hasil tabulasi data. Analisis deskriptif diharapkan dapat mendukung hasil analisis dari penelitian ini, sehingga dapat menggambarkan secara lebih rinci mengenai hasil temuan penelitian. Selain itu, analisis ini juga dapat digunakan untuk mengetahui gambaran pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern pemerintah dan akuntabilitas publik terhadap kinerja instansi pemerintah.

Analisis data penelitian ini adalah analisis regresi berganda (multiple regression) dengan bantuan komputer melalui SPSS 16.0 for windows. Bentuk umum persamaan regresi di rumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kinerja Instansi Pemerintah

a = Konstanta

X1 = Pemanfaatan Teknologi Informasi

X2 = Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

X3 = Akuntabilitas Publik

b1-b3= Koefisien regresi

e = Standar error

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.3. Sampel Penelitian

Penelitian ini menjelaskan mengenai tingkat pengembalian (Responden Rate), gambaran umum responden, statistik deskriptif, hasil uji kualitas data, dan analisis hasil uji hipotesis. Data dalam penelitian merupakan data primer berupa penyebaran kuisisioner yang ditujukan kepada kepala dinas/kadis pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Bengkulu. Pengumpulan data dimulai pada tanggal 2 Mei sampai dengan 2 Juni 2017. Pengumpulan data dilakukan dengan mendatangi OPD Kota Bengkulu secara langsung untuk menyerahkan dan mengumpulkan kembali kuisisioner. Rincian penyebaran dan pengembalian kuisisioner sebagai berikut.

Tabel 1 Rincian Penyebaran dan pengembalian Kuisisioner

Keterangan	Responden	
	Jumlah	Persentase %
Kuisisioner yang disebarkan	38	100%
Kuisisioner yang tidak kembali	3	7,89%
Kuisisioner yang kembali	35	92,10%
Kuisisioner yang tidak dapat diolah	3	7,89%
Kuisisioner yang dapat diolah	32	84,21%

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan dari 38 kuisisioner yang disebarkan, ada sebanyak 35 kuisisioner yang kembali, 3 kuisisioner tidak kembali dan terdapat 3 kuisisioner yang tidak dapat digunakan. Adapun alasan kuisisioner tidak dapat digunakan adalah karena responden tidak mengisi data dengan lengkap dan pengisian jawaban atas pernyataan pada kuisisioner tidak di isi dengan lengkap. Dengan demikian jumlah kuisisioner yang dapat digunakan atau diolah hanya sebanyak 32 kuisisioner.

3.4. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dimaksudkan untuk menganalisis data berdasarkan atas hasil yang diperoleh dari jawaban responden terhadap masing-masing indikator pengukuran variabel. Penelitian ini menguji seberapa besar pengaruh faktor-faktor yang terkait kinerja OPD Kota Bengkulu. Berikut ini adalah tabel statistik deskriptif dapat dilihat dari Tabel 2.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel	Kisaran teoritis			Kisaran aktual			Std. Deviation
	Min	Max	Mean	Min	Max	Mean	
Kinerja Instansi Pemerintah	12	60	36	48	60	51,59	3,706
Pemanfaatan Teknologi Informasi	7	35	21	25	35	29,31	2,822
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	32	10	50	30	38	50	42,00
Akuntabilitas Publik	32	9	45	27	36	45	39,19

Berdasarkan Tabel 2 diatas, variabel kinerja instansi pemerintah mempunyai nilai rata-rata (mean) pada kisaran aktual sebesar 51,59 lebih besar dari pada nilai rata-rata (mean) teoritis, dimana nilai rata-rata (mean) teoritis sebesar 36 dengan tingkat nilai rata-rata sesungguhnya 4,2. Hal ini mengindikasikan bahwa jawaban responden mengenai variabel kinerja instansi menandakan OPD Kota Bengkulu telah memiliki kinerja yang baik.

Pada variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai rata (mean) pada kisaran aktual sebesar 29,31 lebih besar dari pada nilai rata-rata (mean) teoritis, dimana nilai rata-rata (mean) teoritis sebesar 21 dengan tingkat nilai rata-rata sesungguhnya 4,1. Hal ini mengindikasikan bahwa jawaban reponden mengenai pemanfaatan teknologi iformasi menandakan tingkat pemanfaatan teknologi informasi pada OPD Kota Bengkulu sudah baik.

Pada variabel SPIP memiliki nilai rata (mean) pada kisaran aktual sebesar 42,00 lebih besar dari pada nilai rata-rata (mean) teoritis, dimana nilai rata-rata (mean) teoritis sebesar 30 dengan tingkat nilai rata-rata sesungguhnya 4,2. Hal ini mengindikasikan bahwa jawaban reponden mengenai SPIP menandakan tingkat penerapan SPIP pada OPD Kota Bengkulu sudah berjalan dengan baik.

Pada variabel akuntabilitas publik memiliki nilai rata (mean) pada kisaran aktual sebesar 39,19 lebih besar dari pada nilai rata-rata (mean) teoritis, dimana nilai rata-rata (mean) teoritis sebesar 27 dengan tingkat nilai rata-rata sesungguhnya 4,3. Hal ini mengindikasikan bahwa jawaban reponden mengenai akuntabilita publik menandakan tingkat akuntabilita publik pada OPD Kota Bengkulu sudah terlakana dengan baik.

3.5. Hipotesis dan Pembahasan

Setelah melakukan pengujian asumsi klasik dan menunjukkan bahwa model regersi yang memenuhi asumsi klasik, maka tahap selanjutnya adalah melakukan evaluasi dan interpretasi model regerssi linear berganda. Model regeresi berganda dalam penelitian ini adalah menguji

pengaruh pemanfaatan teknologi informasi (X1), sistem pengendalian intern pemerintah (X2) dan akuntabilitas publik (X3) terhadap kinerja instansi pemerintah (Y). Hasil pengujian dan pengelolaan data dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Coeff.	t	Sig.
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,531	4,747	0,000
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	0,293	2,676	0,012
Akuntabilitas Publik	0,197	2,081	0,047
<i>R square</i>			0,896
<i>Adjusted R²</i>			0,885
<i>F</i>			80,393
<i>Sig.</i>			0,000

Sumber : Data diolah tahun 2013

Hasil uji pada tabel 3 di peroleh nilai F sebesar 80,393 dengan tingkat signifikan Pvalue sebesar 0,000. Dengan demikian nilai Pvalue yang diperoleh lebih kecil dari 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa model penelitian yang digunakan dianggap layak uji dan ketiga variabel mampu menggambarkan fenomena kinerja instansi pemerintah di kota Bengkulu. Selanjutnya nilai koefisien determinan adjusted R² sebesar 0,885. Hasil pengujian ini enerangkan bahwa 88 % varian variabel kinerja instansi pemerintah dapat dijelaskan dengan variabel pemanfaatan teknologi informasi (X1), sistem pengendalian intern pemerintah (X2), dan akuntabilitas Publik (X3), sedangkan sisanya sebesar 12 % dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak termasuk kedalam penelitian.

Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja OPD Kota Bengkulu. Berdasarkan statistik deskriptif juga dapat disimpulkan bahwa OPD Kota Bengkulu telah dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan baik karena nilai rata-rata aktual lebih besar dari nilai rata-rata teoritis. Semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi maka akan meningkatkan kinerja instansi yang dihasilkan. Teknologi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penggunaan software atau perangkat dan jaringan internet yang digunakan instansi dalam menjalankan kegiatan ataupun program instansi pemerintah. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan instansi dapat dikatakan berperan penting dalam menjalankan kegiatan ataupun program-program instansi Kota Bengkulu. Hasil penelitian ini didukung hasil penelitian dari Irine Chintya (2015) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil dari uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan hasil dari analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah telah berjalan dengan baik, artinya penerapan pengendalian intern pada OPD Kota Bengkulu telah terlaksana secara efektif karena nilai rata-rata aktual yang di peroleh lebih besar dari nilai rata-rata teoritis. Maka dengan adanya pengendalian inter pemerintah seluruh kegiatan atau proses kegiatan pengawasan lain terhadap organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Dengan demikian, bahwa hubungan antara sistem pengendalian intern pemerintah dengan kinerja instansi pemerintah OPD Kota Bengkulu adalah semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah akan semakin baik

pula kinerja OPD. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasir dan Oktari (2013) dan Chintya (2015) dimana keduanya menerangkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah.

Hasil uji hipotesis berikutnya menunjukkan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja OPD Kota Bengkulu dan berdasarkan hasil dari analisis deskriptif akuntabilitas publik memiliki nilai rata-rata aktual yang diperoleh lebih besar dari nilai rata-rata teoritis dan dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas publik pada OPD kota Bengkulu sudah terlaksana dengan baik. Maka dengan adanya penerapan akuntabilitas publik yang baik pihak internal maupun eksternal dapat merasakan manfaat dari kegiatan yang telah terlaksana sesuai dengan yang telah dianggarkan. Dimana dengan adanya akuntabilitas publik yang tinggi akan memberikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat dinilai baik pihak internal maupun pihak eksternal. Dengan demikian hubungan antara akuntabilitas publik dan kinerja instansi pemerintah adalah semakin baik penerapan akuntabilitas publik pada instansi pemerintah akan semakin baik pula kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Deki (2013) yang menerangkan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial instansi pemerintah. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Arifin (2014) yang menyatakan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja organisasi sektor publik.

5. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern pemerintah dan akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja OPD di Kota Bengkulu. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain sebagai berikut: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja OPD Kota Bengkulu. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penggunaan teknologi informasi maka akan membantu kinerja OPD dalam meningkatkan kinerjanya. Sistem pengendalian intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja pada OPD Kota Bengkulu. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat penerapan pengendalian intern pemerintah maka akan semakin baik pula kinerja OPD. Akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja OPD Kota Bengkulu. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat akuntabilitas publik OPD, maka akan semakin baik pula kinerja OPD.

References

- Achmadi, Indra. 2012. "Kinerja Organisasi". Diakses 29 Desember 2016. indraachmadi.blogspot.co.id/2012/04/kinerja-organisasi.html?m=1.
- Arifin, Andiza Z. 2014. Pengaruh budaya organisasi dan akuntabilitas publik terhadap kinerja organisasi publik (studi pada rumah sakit daerah massenrempulu, Kabupaten Enrekang). Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hasanuddin.
- Bastian, Indra, Ph.D. 2001. Akuntansi Sektor Publik Indonesia. Yogyakarta: BPFE.
- Chintya, Irine. 2015. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Di Kota Solok. Padang: Jurnal Akuntansi.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2013. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba empat.
- Harimurti, Yohanes. 2004. Problematika Suatu Instansi Pemerintah Dalam Menyusun Indikator Kinerja Tinjauan Dan Dimensi Value For Money. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Sektor Publik.

- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, edisi revisi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahoney, et, al. 1963 *Development Of Managerial Performance: A Research Approach*. Cincinnati: South Western Publishing.
- Mahsun, Mohammad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Mahsun, Mohammad. 2011. "Akuntabilitas Kinerja". Diakses 2 Januari 2017. mohmahsun.blogspot.co.id/2011/04/akuntabilitas-kinerja.html?m=1.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Martin, E.W. CW Brown, D.W. DeHayes, J.A. Hoffer, dan W.C Perkins. 2005. *Managing Information Technology*. New Jersey: Prentice- Hall, Inc.
- Good Governance". Diakses 25 Juli 2017. <https://administrasinegaraku.blogspot.co.id/2012/07/akuntabilitas-publik-public.html>
- Nasir, Azwir, and Ranti Oktari. 2010. *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar)*. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Riau.
- Nasir, Azwir, dan Ranti Oktari. 2013. *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar)*. Jurnal Ekonomi.
- Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016. *Pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana kerja pemerintah daerah tahun 2017*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah*.
- Putra, Deki. 2013. *Pengaruh Akuntabilitas Publik Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah kota padang)*. Jurnal Akuntansi.
- Rahadi. 2007. *Peranan Teknologi Informasi dalam peningkatan pelayanan di sektor publik*. Seminar Nasional Teknologi. Yogyakarta.
- Rai, I G.A. 2011. *Audit Kinerja pada Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Riadi, Muchlisin. 2014. "Pengertian, indikator dan faktor yang mempengaruhi kinerja". Diakses 19 Februari 2017. www.kajianpustaka.com/2014/01/pengertian-indikator-faktor-mempengaruhi-kinerja.html?m=1.
- Solikhin, Akhmad. 2006. *Penggabungan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah: Perkembangandan Permasalahan*. Jurnal Akuntansi Pemerintah.
- Sugiyono, Drs. 2010. *Metode penelitian pendidikan. Pendekatan kuantitatif*.
- Syaifulloh, 2013. *Penerapan Teknologi Informasi Di Bidang Pemerintahan*. Di akses 25 Juli 2017. <http://sumbawabaratnews.com/?p=8662>
- Wansyah H, Darwanis dan Bakar U. 2012. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kegiatan Pengendalian terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan SKPD pada Provinsi Aceh*. Jurnal Akuntansi. Vol. 1 No. 1, Agustus, hal 43-58.
- Widyaningrum, Celviana, Rahmawati. 2010. *Pengaruh SDM, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variable Intervening Pengendalian Internal Akuntansi, Studi Empiris di Pemda Subosukawonosraten*. Simposium Nasional Akuntansi XII Purwokerto.
- Wilkinson, W. Joseph, Michael J. Cerullo, Vasant Raval, & Bernard Wong-On-Wing. 2000. *Accounting Information Systems: Essential Concepts and Applications*. Fourth Edition. John Wiley and Sons. Inc.
- Yosefrinaldi. 2013. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Studi Empiris Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Se-Sumatera Barat)*. Skripsi Universitas Negeri Padang: Sumatera Barat..